

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mencari informasi dari beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan, baik itu terkait dengan kekuatan/kelebihan maupun kelemahan/kekurangan yang telah ada. Selain itu, guna mendapatkan informasi serta sumber tambahan yang memiliki kaitan dengan judul yang digunakan guna mendapatkan sebuah landasan teori ilmiah, penulis juga mencari di beberapa tempat, seperti melalui buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun skripsi.

2.1.1 Kerjasama Kesehatan Pemerintah RI dan Australia Dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi di Nusa Tenggara Timur (Falih Rif'atul Mawaddah)

Penelitian terdahulu yang pertama pertama adalah skripsi dari Falih Rif'atul Mawaddah tahun 2019 dengan judul “Kerjasama Kesehatan Pemerintah RI dan Australia Dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi di Nusa Tenggara Timur”.²³ Pada skripsi tersebut, dirinya menjelaskan mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Australia dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia, yang mana pada skripsi ini konteks masyarakatnya adalah ibu dan bayi yang baru lahir di wilayah Nusa Tenggara

²³ Falih Rif'atul Mawaddah, “Kerjasama Kesehatan Pemerintah RI dan Australia Dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi di Nusa Tenggara Timur”, Skripsi (2019).

Timur. Kerja sama ini dilakukan di bawah perjanjian program AIPMNH atau *Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health*.

Selain itu, kerja sama ini juga merupakan sebagai bentuk komitmen serta keseriusan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang turut serta berpartisipasi dan mengambil bagian pada *Millenium Development Goals* atau MDG's poin 4 dan 5 tentang penurunan angka kematian anak serta peningkatan kesehatan ibu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya kerja sama yang dilakukan antara Indonesia – Australia ini bisa dikatakan berhasil membawa kemajuan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi milik Falih Rif'atul Mawaddah yang pertama adalah tentang pihak yang bekerja sama. Pada skripsi milik Falih Rif'atul Mawaddah, Indonesia bekerja sama dengan Australia, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini, pihak yang bekerja sama adalah Pemerintah Indonesia dengan lembaga pembangunan non-pemerintah asal Amerika Serikat, JHCCP.

Perbedaan yang kedua adalah wilayah implelementasi, pada artikel penelitian terdahulu wilayah yang dijadikan studi kasus adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan implementasi wilayah pada penelitian ini adalah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten di Indonesia yang meliputi semua kabupaten/kota di provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Perbedaan yang ketiga adalah ruang lingkup kerja sama. Ruang lingkup kerja sama pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan pada ibu dan bayi baru lahir, sedangkan pada penelitian ini ruang lingkup kerja samanya adalah penguatan dan pengembangan kapasitas program keluarga berencana di Indonesia. Kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu poin yang ada pada Program Keluarga Berencana, yang mana hal tersebut hanyalah salah satunya, sedangkan Program Keluarga Berencana meliputi poin-poin program lainnya.

Kemudian terkait persamaan dengan penelitian ini terletak pada bentuk studi kasusnya, yakni kerja sama internasional guna memenuhi kepentingan dalam negeri pada sektor kesehatan. Baik itu kesehatan ibu dan anak baru lahir maupun Program Keluarga Berencana, sama-sama berada di sektor kesehatan dan juga masih satu linear.

2.1.2 Kerja Sama Bilateral Antara Timor Leste dan Kuba Di Bidang Kesehatan (Paulo Rosario Cepeda Saldanha)

Penelitian terdahulu ketiga adalah skripsi milik Paulo Rosario Cepeda Saldanha tahun 2018 dengan judul “Kerja sama Bilateral antara Timor Leste dan Kuba dibidang Kesehatan”. Skripsi ini membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste dengan Pemerintah Kuba di sektor kesehatan.

Terdapat dua faktor yang melatar belakangi Pemerintah Timor Leste dalam membentuk dan melakukan kerja sama ini, yakni faktor domestik dan eksternal.

Faktor yang pertama adalah faktor domestik, yang mana faktor ini merupakan kondisi domestik Timor Leste yang memiliki kekurangan dan keterbatasan di bidang kesehatan setelah Timor Leste memutuskan melepaskan diri dari Indonesia. Pemisahan diri yang dilakukan oleh Timor Leste ini nyatanya menimbulkan efek domino, salah satunya terjadi pada sektor kesehatan.

Efek domino pada sektor kesehatan yang dialami oleh Timor Leste adalah penurunan terhadap ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat. Hal ini disebabkan tenaga kesehatan Indonesia yang pada saat itu berada dan bertugas di Timor Leste dipulangkan kembali ke Indonesia. Keadaan ini pun menyebabkan jumlah tenaga kesehatan yang berada di Timor Leste pun berkurang dan tidak dapat memberikan pelayanan secara total kepada seluruh masyarakat Timor Leste.

Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Pada faktor ini, Pemerintah Timor Leste mengetahui latar belakang dari sektor kesehatan Kuba sebagai salah satu negara di dunia dengan sistem dan kualitas kesehatan yang bagus. Selain itu, Kuba juga dikenal dengan sebuah program di bidang kesehatan yang bernama *Cuban Solidarity Aid*, yang mana program ini memiliki tujuan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan secara gratis kepada negara-negara miskin.²⁴

Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi milik Paulo Rosario yang pertama adalah pihak yang bekerja sama. Pada skripsi milik Paulo Rosario,

²⁴ Paulo Rosario Cepeda Saldanha, "*Kerja sama Bilateral antara Timor Leste dan Kuba dibidang Kesehatan*", Skripsi (2018).

Timor Leste bekerja sama dengan Kuba. Kemudian perbedaan yang kedua adalah penerapan dari kerja sama yang dilakukan, yang mana pada penelitian penulis, penerapan kerja samanya adalah program keluarga berencana, sedangkan skripsi milik Paulo Rosario adalah penerapan di bidang kesehatan secara *general* atau luas.

2.1.3 Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas (Devi Yulianti)

Penelitian yang ketiga adalah sebuah artikel jurnal tahun 2017 milik Devi Yulianti yang berjudul “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas”.²⁵ Dalam artikelnya ia menjelaskan mengenai program GenRe yang mana Program GenRe sendiri merupakan salah satu program kerja milik Pemerintah Indonesia (BKKBN) yang lahir akibat kepedulian dan juga kekhawatiran terhadap generasi penerus bangsa.

Sasaran dari program GenRe sendiri adalah para remaja Indonesia serta para keluarga yang memiliki anak remaja. Program GenRe merupakan program yang dikembangkan dari program keluarga berencana yang dilain sisi juga sebagai strategi pemerintah guna mendidik serta membina para remaja di Indonesia agar kelak menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko Triad KKR (Seksualitas, HIV/AIDS, dan Napza).

²⁵ Devi Yulianti, “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas”, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017). Hlm. 93-108.

Napza merupakan sebuah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya seperti opioid, alkohol, ekstasi, ganja, morfin, heroin, dan kodein. Zat-zat tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem saraf pusat apabila masuk ke dalam tubuh, dan juga penggunaan Napza memiliki risiko bagi kesehatan reproduksi. Hal ini dikarenakan berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku seks bebas.²⁶

Sama seperti penelitian terdahulu yang pertama, GenRe sendiri merupakan program pengembangan dari program Keluarga Berencana. Perbedaan antara penelitian Devi Yulianti dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya. Pada penelitian ini, pembahasannya adalah terkait kerja sama internasional dalam program keluarga berencana, sedangkan penelitian Devi Yulianti hanya membahas mengenai program GenRe yang merupakan program skala nasional turunan dari program keluarga berencana tanpa adanya penjelasan mengenai apakah terdapat aktor atau pihak antar negara yang melakukan kerja sama.

2.2 Teori dan Konsep

Pada penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan JHCCP adalah teori pluralisme, kerja sama internasional, dan konsep pembangunan kapasitas. Teori pluralisme hubungan internasional dan kerja sama internasional digunakan untuk menganalisis interaksi berupa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia sebagai

²⁶ Jenny Mandang dkk, “Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)”, (Bogor: IN Media, 2016), hlm. 51.

aktor negara dengan JHCCP sebagai aktor non negara. Sedangkan konsep pembangunan kapasitas digunakan untuk menganalisis bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan JHCCP dalam program keluarga berencana.

2.2.1 Pluralisme Hubungan Internasional

Pada hakikatnya, hubungan internasional adalah suatu hubungan yang dilakukan antar suatu aktor yang dalam hal ini adalah negara dengan aktor negara yang lain. Namun hal ini dibantah oleh paradigma pluralisme. Pluralisme adalah sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang meyakini akan adanya heterogenitas aktor di dalam hubungan internasional. Pluralisme meyakini bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor, tetapi terdapat pula aktor lain seperti aktor non negara (NGO dan INGO), MNC, dan kelompok individu lintas batas negara.

Empat asumsi dasar dari pluralisme yang dijelaskan oleh Viotti dan Kauppi (1993) dalam membantu menjelaskan pluralisme sebagai sebuah teori adalah:

1. Aktor non-negara memainkan peran penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional (pemerintah dan non-pemerintah), MNC, kelompok atau individu transnasional
2. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal, karena aktor-aktor lain memainkan peranan yang sama pentingnya dengan negara. Tentu saja hal ini tidak menjadikan lagi negara sebagai aktor tunggal
3. Negara bukan aktor rasional. Hal ini disebabkan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara akan menemui gesekan-gesekan seperti konflik dan kompetisi antar aktor di dalam negara

4. Masalah-masalah yang muncul tidak lagi terfokus pada *power* atau *national security*, akan tetapi telah berkembang dan meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.²⁷

Pluralisme percaya bahwa interaksi berupa kerja sama yang dilakukan oleh aktor negara dengan non-negara akan lebih efisien dalam menyelesaikan isu-isu yang terjadi pada masyarakat. Hal ini disebabkan fokus bidang yang dimiliki oleh aktor non-negara jauh lebih spesifik. Selain itu dengan meyakini akan keberagaman aktor serta interaksi yang terjadi, ilmuwan pluralisme memandang bahwa eksistensi dari aktor-aktor non negara dapat diperhitungkan serta membawa pengaruh yang bermakna dalam sistem internasional.²⁸

Berangkat dari asumsi teori pluralisme bahwa kerja sama yang dilakukan antar aktor negara dengan non-negara akan lebih efisien, teori ini penulis gunakan untuk menjelaskan terkait pentingnya eksistensi aktor non-negara, yang mana dalam penelitian ini adalah organisasi internasional non-pemerintah dalam membantu menguatkan dan mengembangkan program keluarga berencana di Indonesia.

2.2.2 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional adalah sebuah langkah yang diambil oleh sebuah negara dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dalam negeri dengan negara lain di dunia. Dalam menjalankan kerja sama luar negeri yang mencakup sektor-

²⁷ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *“International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism”*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1993), hlm. 199.

²⁸ Mohtar Mas’oed, *“Isu dan Aktor Politik Luar Negeri”*, (Sleman: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 12.

sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan, negara berpedoman kepada kebijakan politik luar negeri mereka masing-masing.²⁹

Lebih lanjut mengenai kerja sama internasional, melalui bukunya yang berjudul *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Teuku May Rudi mendefinisikan kerja sama internasional sebagai sebuah bentuk kerja sama yang melampaui batasan yang berlaku pada setiap negara dengan berlandaskan pada struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan berlangsung guna melaksanakan fungsinya secara sistematis dalam upaya tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun sesama organisasi non pemerintah di negara yang berbeda.³⁰

2.2.3 Konsep Pembangunan Kapasitas

Pembangunan kapasitas dilakukan sebagai upaya dalam melakukan peningkatan terhadap kemampuan dari masyarakat suatu negara untuk mengembangkan keterampilan terkait manajemen dan juga kebijakan yang fundamental yang diperlukan dalam rangka membangun struktur budaya, sosial, politik, ekonomi dan juga sumber daya manusia.

Dalam menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep pembangunan kapasitas, Sensions menjelaskan definisi dari pembangunan kapasitas, yakni:

“capacity building usually is understood to mean helping governments, communities and individuals to develop the skills and expertise needed to

²⁹ Yanuar Ikbar, *“Metodologi & Teori Hubungan Internasional”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 273.

³⁰ Teuku May Rudi, *“Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional”*, (Bandung: Angkasa, 1993).

achieve their goals. Capacity building program, often designed to strengthen participant's abilities to evaluate their policy choices and implement decisions effectively, may include education and training, institutional and legal reforms, as well as scientific, technological and financial assistance"

Berdasarkan pernyataan Sensions tersebut, pengembangan kapasitas dapat digambarkan sebagai langkah-langkah dalam membantu pemerintah, masyarakat, atau individu guna mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka.. Pembangunan kapasitas yang dimaksud mencakup pendidikan dan pelatihan, kemudian reformasi peraturan dan kelembangaan, serta teknologi dan keilmuwan.³¹

Terkait dengan penjelasan dari konsep pembangunan kapasitas di atas, maka dalam konteks penelitian skripsi ini adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas negara dalam program keluarga berencana melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas serta tenaga kesehatan, dan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program keluarga berencana.

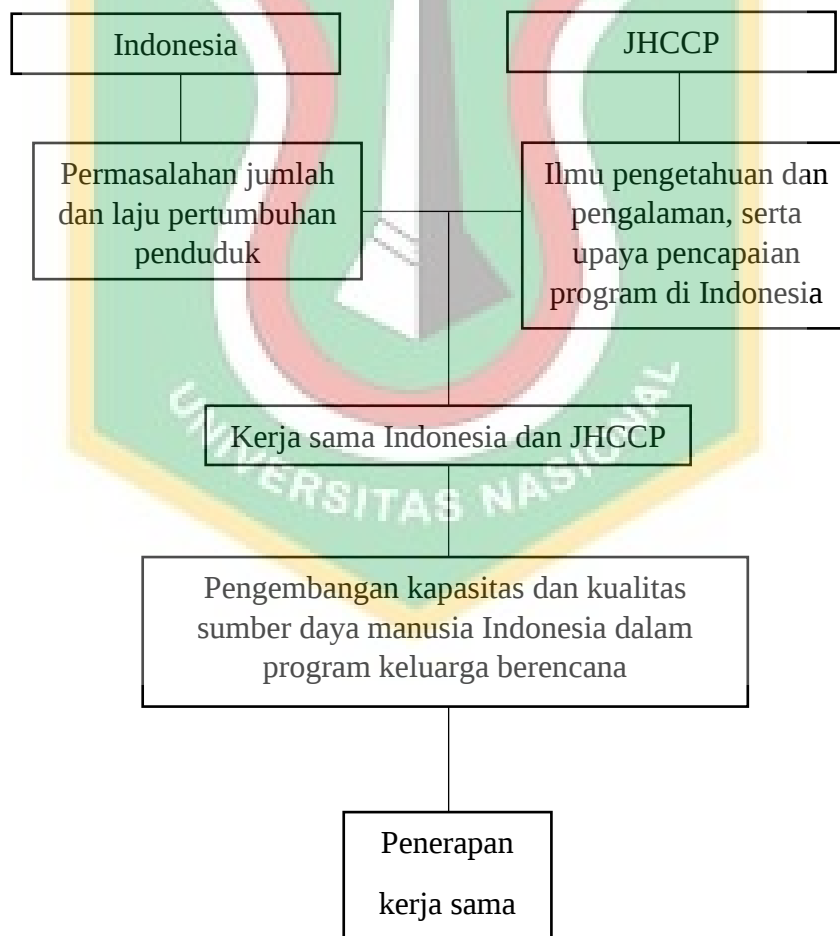
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini akan menguraikan secara garis besar bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada penelitian ini, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai jumlah serta laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, dimana apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan membawa

³¹ Bambang Santoso Haryono, dkk, "*Capacity Building*", (Malang: UB Press, 2012), hal. 39-40.

dampak negatif bagi beberapa sektor di dalam negeri pada sebuah negara, seperti sektor lingkungan dan ketenagakerjaan.

Kemudian penulis memaparkan bentuk dari kerja sama, serta dampak bagi hubungan kedua negara dari kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan JHCCP dalam program keluarga berencana pada tahun 2019-2020 dalam rangka membantu mengatasi permasalahan kependudukan tersebut di Indonesia. Penulis akan mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan teori pluralisme, kerja sama internasional, serta konsep pembangunan kapasitas.



Indonesia dengan permasalahan tingginya jumlah serta laju pertumbuhan penduduk memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan JHCCP yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait program keluarga berencana pada tahun 2019-2020. Sedangkan JHCCP pada kerja sama ini memiliki kepentingan untuk bisa mencapai dan mensukseskan program bernama “Pilihanku” yang sudah mereka jalankan di Indonesia sejak tahun 2014.

Interaksi berupa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia sebagai aktor negara dengan JHCCP yang merupakan aktor negara dalam sektor kesehatan program keluarga berencana dianalisis menggunakan teori pluralisme hubungan internasional dan kerja sama internasional. Mengacu pada data-data yang penulis peroleh, bentuk dari kerja sama antara Indonesia dan JHCCP ini adalah dukungan bantuan teknis yang diberikan oleh JHCCP kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas Indonesia pada program keluarga berencana.

Dukungan bantuan teknis yang diberikan oleh JHCCP kepada Pemerintah Indonesia mencakup dua ruang lingkup, yang pertama adalah penguatan program keluarga berencana di Indonesia. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah pengembangan kapasitas Indonesia pada program keluarga berencana. Konsep pembangunan kapasitas digunakan untuk menganalisis kedua ruang lingkup dari kerja sama ini.